



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSNUL KHOTIMAH
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA
3. NHK : 986959

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.415.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/36 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 215.250.000
4. Tanah Seluas 546.000 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **312.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER CROSS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **35.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.142.966.299
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.905.216.299
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.905.216.299

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.